



STRUKTUR PRODUKSI,

DISTRIBUSI PENDAPATAN

DAN KEMISKINAN

A. PENDAPATAN NASIONAL

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/ sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

- Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara
- Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
- Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

Meskipun demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Adapun kritik tersebut diantaranya adalah :

- Ada faktor-faktor lain di luar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan
- Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif. Tiap orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannya pun berbeda

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran-ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :

Dudley Seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara. 3 masalah tersebut adalah :

- Tingkat kemiskinan
- Tingkat pengangguran
- Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

J.L. Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia. 4 hal tersebut adalah :

1. Kesehatan dan keamanan
2. Pendidikan keahlian dan standart hidup
3. Pendapatan
4. Pemukiman

Hendra Esmara, lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yakni :

1. Penduduk dan kesempatan kerja
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Pemeratan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan tiga pendekatan perhitungan, yakni :

- a. Pendekatan produksi
- b. Pendekatan pengeluaran
- c. Pendekatan pendapatan

Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :

- a. Konsep kewarganegaraan, dan
- b. Konsep kewilayahan

Menghitung pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan produksi (GDP)

GDP (Gross Domestic Product) atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut, jangan sampai terjadi perhitungan ganda (double counting) yang dapat menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak lebih besar. Salah satu akibatnya adalah, seolah-olah negara Indonesia sudah cukup maju dan makmur (terlihat dari GDP yang tampak besar), sehingga bantuan luar negeri akan dialihkan ke negara yang lebih membutuhkan. Dengan demikian kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan dana pembangunan, sedangkan kita sesungguhnya masih sangat membutuhkannya.

Untuk menghindari kesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan salah satu dari dua cara di bawah ini.

Pertama, GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhirnya saja (mobil) yang akan dihitung.

Contoh ilustrasinya adalah :

- Produsen I petani gandum, produksinya dinilai Rp 200,-/satuan tertentu
- Produsen II pabrik tepung terigu, produksinya bernilai Rp 500,-/satuan tertentu
- Produsen III pabrik Roti, produksinya dinilai Rp 750,-/satuan tertentu

Dari ilustrasi sederhana di atas, maka pendapatan nasional (GDP) Indonesia adalah sebesar Rp 750,-, yakni hanya menilai hasil akhirnya saja. Karena nilai roti seharga Rp 750,- tersebut telah terkandung unsur gandum dan tepung terigu. Yang dimaksud dengan perhitungan ganda adalah dengan menganggap bahwa pendapatan nasional (GDP) Indonesia adalah sebesar Rp 1.450,- ($200 + 500 + 750$). Sehingga hasil sebesar Rp 1.450,- sangat menyesatkan, dan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya

Kedua, dengan menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen, sehingga jika kita gunakan ilustrasi di atas, maka pendapatan nasional (GDP) Indonesia dengan cara ini akan menghasilkan jumlah yang sama.

- ◆ Produsen I petani gandum, produksinya dinilai Rp 200,-/satuan tertentu, karena sebelumnya tidak ada produksi, kemudian ada produksi gandum senilai Rp 200,-, maka ada nilai tambah sebesar Rp 200,-

- ❖ Produsen II pabrik tepung terigu, produksinya bernilai Rp 500,-/satuan tertentu, dari bahan baku gandum yang hanya seharga Rp 200,- menjadi tepung terigu dengan harga Rp 500,-, berarti ada nilai tambah sebesar Rp 300,-
- ❖ Produsen III pabrik Roti, produksinya dinilai Rp 750,-/satuan tertentu, setelah tepung terigu diolah oleh pabrik roti menjadi Roti, maka terdapat nilai tambah senilai Rp 250,-

Dari ilustrasi di atas, jika kita akumulasi maka total nilai tambah dari masing-masing komoditi (gandum, tepung, dan roti) tersebut adalah sebesar Rp 750,- (200 + 300 + 250), di mana angka ini sama besarnya dengan pendapatan nasional (GDP) Indonesia jika dihitung dengan cara yang pertama.

Sebagai catatan, Gross Domestic Product ini diperoleh dengan menggunakan konsep Kewilayahan, artinya nilai produksi tersebut diperoleh dari seluruh kegiatan produksi dari semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan produksinya di wilayah Indonesia saja, tidak dilihat apakah dia berwarga negara Indonesia atau warga negara asing.

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan cara memperoleh GDP, jika GDP dibatasi oleh wilayah, maka GNP dibatasi oleh kewarganegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.

Ilustrasi perhitungannya adalah :

Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk konsumsi)	XXX
Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi)	XXX
Pengeluaran pemerintah (Government expenditure)	XXX
Sektor luar negeri/Ekport netto (Ekspor - Impor)	(XXX)
	+
Pendapatan nasional (GNP) Inonesia adalah	XXX

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sector ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI inilah yang tampaknya oleh kalangan akademisi dinotasikan dengan Y.

Ilustrasi sederhana dari perhitungan NI ini adalah :

Pendapatan dari sektor rumah tangga berupa gaji/upah	XXX
pendapatan dari sektor swasta laba, misalnya	XXX
Pendapatan pemerintah	XXX
Pendapatan sektor luar negeri, devisa misalnya	XXX
Pendapatan Nasional Indonesia (NI)	<u> </u> + XXX

Pertanyaan yang kemudian mungkin muncul adalah 'Pendapatan nasional yang manakah yang sebaiknya dipergunakan, GDP, GNP, atukah NI ?'. Secara prinsip ketiga jenis pendapatan nasional tersebut dapat menghasilkan nilai yang sama, tentu saja dengan sedikit penyesuaian. Penyesuaian penyesuaian tersebut diantaranya adalah :

Agar pendapatan nasional (GNP) nilainya sama dengan GDP, maka GNP tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan 'pendapatan netto luar negeri dari faktor produksi'. Yang dimaksud dengan pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di negara lain dengan pengeluaran negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila di lihat dari neraca jasa Indonesia, masih menunjukkan nilai yang negatif (defisit). Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda (kewarganegaraa dan kewilayahan). Dengan demikian jika dituliskan dalam bentuk formula adalah :

- $GDP = GNP - \text{Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi}$
- $GDP = GNP - (\text{Penerimaan f.produksi WNI di LN} - \text{Penerimaan f.prod WNA di Indonesia})$

Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan NI, diperlukan formulasi sebagai berikut :

- $NI = GNP - \text{Depresiasi} - Tx \text{ tak langsung}$, dimana $GNP - \text{Depresiasi}$ sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau **Produksi Nasional Bersih**
- $NI = GDP - \text{Depresiasi} - Tx \text{ tak langsung}$, dimana $GDP - \text{Depresiasi}$ sendiri sering disebut dengan NDP (Net Domestic Product) atau **Produksi Domestik Bersih**

Disamping ketiga istilah pendapatan nasional tersebut (GDP, GNP, NI) tersebut, masih ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yakni :

Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan (Y disposable)

Yang dimaksud dengan pendapatan nasional (Y) disposable adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposable ini berasal dari NI (National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa transfer/subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam formula, nilainya diperoleh dari :

$Y \text{ disposable} = NI + Tr - Tx \text{ langsung}$, dimana

$Tr = \text{Government Transfer, subsidi pemerintah}$

$Tx = \text{Pajak langsung}$

Y pribadi

Pendapatan nasional pribadi adalah pendapatan nasional disposable yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung dengan formula :

$Y_p = Y_d - Tx \text{ pribadi}$, dimana :

$Y_p = \text{Pendapatan nasional pribadi}$

$Y_d = \text{Pendapatan nasional disposable}$

Pendapatan Nasional Per kapita

Pendapatan per kapita/tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia)

B. KEMISKINAN

Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu negara adalah masalah kemiskinan. Untuk itulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogi Pembangunan yang didalamnya ada poin pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan masih cukup besar (+/- dari 100 orang Indonesia, 11-12 orang diantaranya masih miskin), namun upaya untuk mengentaskan mereka terus diupayakan. Beberapa diantaranya adalah dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa kriteria garis kemiskinan di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni :

Peneliti	Kriteria	Garis Kemiskinan		
		Kota	Desa	Kota + Desa
Esmara 1969/70,1	Konsumsi beras per kapita/th (kg)			125
Sayogya 1971,1	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang/th (kg) Miskin Miskin sekali Paling miskin	480 360 270	320 240 180	
Ginneken 1969,1	Kebutuhan Gizi minimum per orang/hari Kalori Protein (gram)		2000 50	
Anne Booth 1969/70,1	Kebutuhan Gizi min./orang/hari Kalori Protein	2000 40		
Gupta 1973,1	Kebutuhan Gizi min./orang/th (Rp)			24.000
Hasan 1975,1	Pendapatan minimum/kapita/th (US \$)	125	95	
BPS 1984,2	1. Konsumsi kalori per kapita/hari 2. Pengeluaran per kapita/bln (Rp)	13.731	7.746	2.100
Sayogya 1984,2	Pengeluaran/kapita/bulan (Rp)	8.240	6.585	
Bank Dunia 1984,2	Pengeluaran/kapita/bulan (Rp)	6.719	4.479	
Grs. Kemisk. Internasional 1 Interim rpt 1976,2 2 Ahluwalia 1975,3	Pendapatan/kapita/tahun Nilai US \$ 1970 US \$ Paritas daya beli Tingkat pendapatan/kapita/th (US \$)			75 200 50 75

Sumber

- 1 Henra Esmara (1986), Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Gramedia
- 2 Kompas. Senin 9 Mei 1988
- 3 Montek S Ahluwalia (1974) Income Inequality Some Dimensiaon of The Problem. dalam Hollis Chenery Redistribution with Growth (London University Press, 1974) hlm.6-10, seperti dikutip oleh Soemtro Djohadikusumo dalam Prisma no. 2 tahun IV (April 1975), hal. 24.

Untuk indikator lengkap mengenai kemiskinan dapat dilihat pada lampiran diktat ini.